



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

Hasil pengukuran kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2017. Disamping itu laporan ini juga berfungsi sebagai sarana bagi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders sesuai peraturan Menpan dan Reformasi Bitokrasi nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai sarana evaluasi mandiri (seft evaluation) atas pencapaian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam upaya penyempurnaan kinerja, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang.

Dengan tersusunanya laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang lakukan Pusat SDM Kesehatan pada tahun 2017 dan selanjutnya laporan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian target indikator, penyerapan/ realisasi dana dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kami berharap penyusunan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengembalian keputusan di masa yang akan datang.

Jakarta, 31 Januari 2018

Kepala Puslat SDM Kesehatan,



dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS
NIP 196007311989031003

DAFTAR ISI

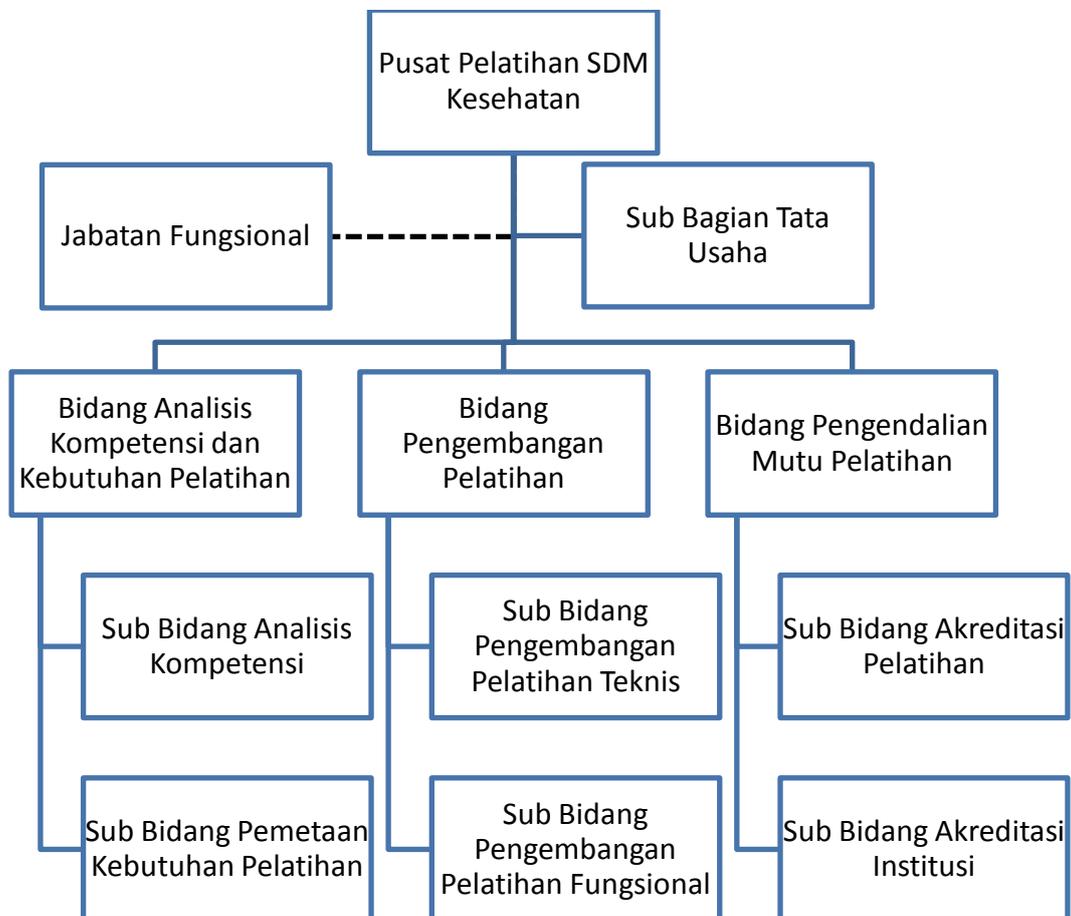
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Pokok, dan Fungsi	2
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	5
	B. Perjanjian Kinerja	6
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	8
	B. Realisasi Belanja dan Anggaran	15
	C. Lain-lain	20
BAB IV	PENUTUP	30

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, struktur organisasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah sebagai berikut :



Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan satuan kerja tingkat eselon II yang kedudukannya berada dalam koordinasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan selaku eselon I.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XI/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 ini merupakan gambaran sejauh mana tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebagai bentuk penjabaran dari rencana program dan kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan serta mengidentifikasi tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan maka Pusat pelatihan SDM Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut maka Pusat Pelatihan SDM kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- pelaksanaan administrasi Pusat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terdiri dari 3 bidang dan 1 sub bagian yaitu:

- A. Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM kesehatan.

Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- 1 Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber day amanusia kesehatan
- 2 Penyiapan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan

Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan terdiri dari :

- 1 Sub Bidang Analisis Kompetensi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan
- 2 Sub Bldang Pemetaan Kebutuhan Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan lainnya termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan

- B. Bidang Pengembangan Pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan SDM Kesehatan.

Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- 1 Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia kesehatan
- 2 Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia kesehatan

Bidang Pengembangan Pelatihan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Teknis, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis sumber day amanusia kesehatan termasuk manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi

- 2) Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Fungsional, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan jabatan fungsional tertentu dan umum

C. Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pelatihan.

Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- 1 Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan
- 2 Penyiapan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan

Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Akreditasi Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan
- 2) Sub Bidang Akreditasi Institusi Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan

D. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik Negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat

E. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, maka indikator Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi (orang) dengan target sebagai berikut :

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi (orang)	(Based Line)	21.170	25.000	30.000	30.000

Sasaran Strategis Puslat SDM Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 dalam rangka meningkatkan kompetensi, mutu serta standar pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM kesehatan adalah :

- a. Tersedianya Peta dan Rencana Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan.
- b. Terselenggaranya pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan.
- c. Terbinanya semua institusi pelatihan, penyelenggara diklat lainnya, tenaga pelatih, serta tenaga pelatihan secara periodik.
- d. Tersedianya sumber daya pelatihan SDM kesehatan, baik pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai standar, teralokasi dengan benar, dan dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.
- e. Berkembangnya pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Menguatnya jejaring antar berbagai pemangku kepentingan baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan SDM kesehatan.
- g. Termanfaatkannya instalasi kajian kompetensi SDM kesehatan dalam pengembangan pelatihan yang berdampak terhadap karier SDM kesehatan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dimana tercantum target yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA			
Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Tahun : 2017			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelatihan SDM Kesehatan	1 Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan Teknis dan Fungsional terakreditasi 2 Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih Substansi Promosi Kesehatan 3 Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan	25.000 orang 3.480 orang 290 orang

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 40.549.442.000,-
(Empat puluh milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Dalam Perjanjian Kinerja ini target indikator yang akan dicapai 25.000 orang yang dalam pelaksanaannya diperoleh dari penyelenggaraan pelatihan pada UPT di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan 3 (tiga) Balai Pelatihan Kesehatan yaitu BBPK Jakarta, BBPK Ciloto, BBPK Makassar, Bapelkes Cikarang, Bapelkes Semarang dan Bapelkes Batam. Selain itu pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan dana dekonsentrasi di 34 provinsi di Indonesia serta pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi yang dilaksanakan oleh Rumah sakit dan pihak swasta.

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh :

- 1) Pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a) Pelaksanaan Training Need Assesment
 - b) Analisis Kompetensi
 - c) Pemetaan Kebutuhan Pelatihan
 - d) Penyusunan Bahan Ajar, Kurikulum, Modul, dan Standarisasi Kurikulum
 - e) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur Pedoman, Kriteria Pelatihan
 - f) Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan
 - g) Pelaksanaan Akreditas Institusi Pelatihan
 - h) Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan
- 2) Layanan Internal
- 3) Layanan Perkantoran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Permenkes No. 64 tahun 2015 maka tugas Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yaitu untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKK yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 untuk Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan Teknis dan Fungsional terakreditasi sebanyak 25.000 orang.

Dalam upaya pencapaian indikator tersebut, pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan bersinergi dan bekerja sama dengan UPT di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan 3 (tiga) Balai Pelatihan Kesehatan yaitu BBPK Jakarta, BBPK Ciloto, BBPK Makassar, Bapelkes Cikarang, Bapelkes Semarang dan Bapelkes Batam serta pelaksanaan pelatihan yang dilakukan dengan dana dekonsentrasi di 34 provinsi di Indonesia.

Adapun hasil capaian kinerja tahun anggaran 2017 pada UPT di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sebagai berikut :

1) BBPK Jakarta

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
27,828,089,000	4,078	25,267,640,750	4,410	90.80%	108.14%

2) BBPK Ciloto

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
64,515,534,000	5,267	56,267,660,849	5,499	87.22%	104.40%

3) BBPK Makassar

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
21,992,037,000	2,994	19,666,373,977	4,246	89.42%	141.82%

4) Bapelkes Cikarang

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
7,891,321,000	979	7,723,246,750	998	97.87%	101.94%

5) Bapelkes Semarang

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
8,862,972,000	1,877	7,992,716,004	1,826	90.18%	97.28%

6) Bapelkes Batam

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
18,660,807,000	2,682	16,430,241,899	2,690	88.05%	100.30%

Selain itu hasil capaian kinerja pelatihan melalui dana dekonsentrasi yang dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia sebagai berikut :

No	Provinsi	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DKI Jakarta	930	596	64.09%	3,610,870,000	2,128,511,700	58.95%
2	Jawa Barat	1,317	1,287	97.72%	4,640,288,000	4,261,188,000	91.83%
3	Jawa Tengah	1,260	1,317	104.52%	4,725,051,000	4,097,085,240	86.71%
4	DI Yogyakarta	305	302	99.02%	1,281,290,000	1,112,801,700	86.85%
5	Jawa Timur	1,350	1,322	97.93%	5,459,350,000	4,664,265,000	85.44%
6	NAD	270	252	93.33%	1,599,629,000	1,025,382,300	64.10%
7	Sumatera Utara	570	508	89.12%	2,584,786,000	2,472,461,300	95.65%
8	Sumatera Barat	296	296	100.00%	1,272,676,000	1,129,633,150	88.76%
9	Riau	270	264	97.78%	1,498,515,000	1,305,845,150	87.14%
10	Jambi	303	303	100.00%	1,173,700,000	1,096,894,700	93.46%
11	Sumatera Selatan	387	387	100.00%	1,896,786,000	1,701,631,200	89.71%
12	Lampung	705	705	100.00%	2,717,882,000	2,480,624,600	91.27%
13	Kalimantan Barat	318	317	99.69%	1,435,257,000	1,175,976,241	81.93%
14	Kalimantan Tengah	318	315	99.06%	1,735,985,000	1,405,746,500	80.98%
15	Kalimantan Selatan	300	300	100.00%	1,453,414,000	985,037,450	67.77%
16	Kalimantan Timur	180	180	100.00%	1,326,379,000	923,478,500	69.62%
17	Sulawesi Utara	210	209	99.52%	1,170,388,000	1,147,527,000	98.05%
18	Sulawesi Tengah	285	285	100.00%	1,644,393,000	1,631,341,600	99.21%
19	Sulawesi Selatan	482	478	99.17%	2,271,538,000	2,165,170,500	95.32%
20	Sulawesi Tenggara	270	260	96.30%	1,486,164,000	1,434,246,400	96.51%
21	Maluku	224	192	85.71%	1,661,059,000	1,290,484,700	77.69%
22	Bali	180	180	100.00%	1,080,033,000	1,030,995,000	95.46%
23	NTB	264	254	96.21%	1,161,984,000	1,055,558,600	90.84%
24	NTT	210	186	88.57%	1,519,856,000	1,295,872,148	85.26%
25	Papua	210	180	85.71%	2,705,978,000	2,188,394,150	80.87%
26	Bengkulu	282	282	100.00%	1,574,090,000	1,206,176,700	76.63%
27	Maluku Utara	270	236	87.41%	2,049,476,000	1,785,386,265	87.11%
28	Banten	495	495	100.00%	3,742,908,000	3,436,022,500	91.80%
29	Bangka Belitung	260	260	100.00%	1,451,900,000	1,161,983,600	80.03%
30	Gorontalo	240	180	75.00%	2,242,768,000	2,124,778,275	94.74%
31	Kepulauan Riau	218	217	99.54%	1,610,490,000	1,493,362,900	92.73%
32	Papua Barat	289	208	71.97%	3,613,846,000	2,149,379,000	59.48%
33	Sulawesi Barat	210	188	89.52%	1,354,728,000	955,161,487	70.51%
34	Kalimantan Utara	173	98	56.65%	1,481,196,000	716,394,100	48.37%
	TOTAL	13,851	13,039	94.14%	72,234,653,000	60,234,797,656	83.39%

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan dalam pencapaian target pelatihan dengan menggunakan dana dekonsentrasi, mengalami beberapa kendala dan permasalahan yang didapat dari hasil review dan masukan yang diperoleh, sebagai berikut :

- 1 Dinas Kesehatan Provinsi mempunyai program sendiri yang harus dijalankan sehingga melaksanakan program provinsi dahulu
- 2 Koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan provinsi dan Bapelkes daerah perlu lebih ditingkatkan
- 3 Kebijakan perubahan jenis pelatihan mengakibatkan perlu adanya revisi yang mengakibatkan pelaksanaan pelatihan tertunda menunggu revisi terbit atau adanya perubahan jenis pelatihan
- 4 Pelaksanaan TOT Manajemen Puskesmas dilaksanakan bulan September sehingga pelaksanaan pelatihan mengalami reschedule ulang dan harus selesai bulan desember
- 5 Adanya revisi target pelatihan yang membutuhkan proses sehingga pelaksanaan pelatihan baru selesai menjelang akhir tahun
- 6 Pelatihan prioritas PIS-PK dilaksanakan di 34 provinsi dengan capaian sebesar 94,14 %, dimana dari target 13.851 orang tidak dapat terpenuhi dan hanya mencapai 13.039 orang.
- 7 Pelaksanaan pelatihan berbarengan dengan pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga ada beberapa peserta yang tidak dapat mengikuti pelatihan
- 8 Pelatihan dana dekonsentrasi di 34 provinsi berdasarkan output dengan perubahan target sebagai berikut :

No	Provinsi	SEMULA		MENJADI	
		501	502	501	502
1	DKI Jakarta	930	-	930	-
2	Jawa Barat	1,470	30	1,470	30
3	Jawa Tengah	1,260	30	1,260	30
4	DI Yogyakarta	120	180	95	210
5	Jawa Timur	1,320	60	1,350	-
6	Nanggroe Aceh Darussalam	120	150	90	180
7	Sumatera Utara	1,215	60	570	-
8	Sumatera Barat	160	172	121	175
9	Riau	150	170	90	180
10	Jambi	120	180	93	210
11	Sumatera Selatan	330	90	387	-
12	Lampung	750	30	705	-
13	Kalimantan Barat	150	90	210	108
14	Kalimantan Tengah	150	120	150	120

15	Kalimantan Selatan	150	120	150	120
16	Kalimantan Timur	120	90	90	90
17	Sulawesi Utara	120	90	120	90
18	Sulawesi Tengah	150	120	135	150
19	Sulawesi Selatan	450	60	482	-
20	Sulawesi Tenggara	150	120	150	120
21	Maluku	125	120	119	105
22	Bali	180	180	90	90
23	Nusa Tenggara Barat	210	-	264	-
24	Nusa Tenggara Timur	210	-	210	-
25	Papua	150	60	150	60
26	Bengkulu	150	120	102	180
27	Maluku Utara	240	30	240	30
28	Banten	30	90	495	-
29	Bangka Belitung	120	120	120	140
30	Gorontalo	90	120	120	120
31	Kepulauan Riau	960	30	68	150
32	Papua Barat	160	120	160	120
33	Sulawesi Barat	120	90	120	90
34	Kalimantan Utara	140	105	143	30
	TOTAL	12,270	3,042	10,906	2,898
	TOTAL 2076		15,312		13,804

- 9 Capaian untuk masing-masing pelatihan dengan dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

No	Pelatihan	Target	Capaian	%
1	Keluarga Sehat	8581	8541	99.53
2	Manajemen Puskesmas	3136	3113	99.26
3	Komunikasi Perubahan Perilaku	331	255	77.03
4	Tim Penilai JabFung Kesehatan	372	271	72.84

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusat pelatihan SDM kesehatan dan Kepala Badan PPSDM Kesehatan dimana sasarannya adalah meningkatnya pelatihan SDM Kesehatan dengan indikator kinerja Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi. Indikator ini diperoleh dari sertifikat pelatihan terakreditasi yang diterbitkan oleh Pusat pelatihan SDM Kesehatan.

Pengukuran kinerja Pusat pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017 diuraikan pada tabel dibawah ini :

Pengukuran Kinerja Pusat pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017

KEGIATAN					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Presentase Pencapaian Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi	orang	25.000	43.691	174,76 %
Jumlah Anggaran kegiatan Tahun 2017			Rp. 29.382.345.000,-		
Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017			Rp. 25.712.762.481,- (87,51%)		

Capaian kinerja Pusat pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017 terhadap target tahun 2017 mencapai 174,76 % yang diperoleh dari jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan maka sasaran kegiatan pelatihan SDM Kesehatan adalah pelatihan teknis dan fungsional bagi SDM Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran adalah jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi dengan target sebanyak 115.170 orang

Terjadi revisi renstra pada tahun 2017 yang semula target kumulatif hingga tahun 2019 sebanyak 45.000 (orang) yang kemudian direvisi sehingga target tidak kumulatif lagi, tetapi target per tahun seperti yang dijelaskan lebih lanjut pada matrik target kinerja Pusat pelatihan SDM Kesehatan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel

Matrik Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian kesehatan Tahun 2015-2019

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Baseline (2014)	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelatihan SDM Kesehatan	Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi SDM kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi (orang)	Menghitung Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan Untuk Peserta Pelatihan Yang Mengikuti Pelatihan Terakreditasi	-	9.000	21.170	25.000	30.000	30.000

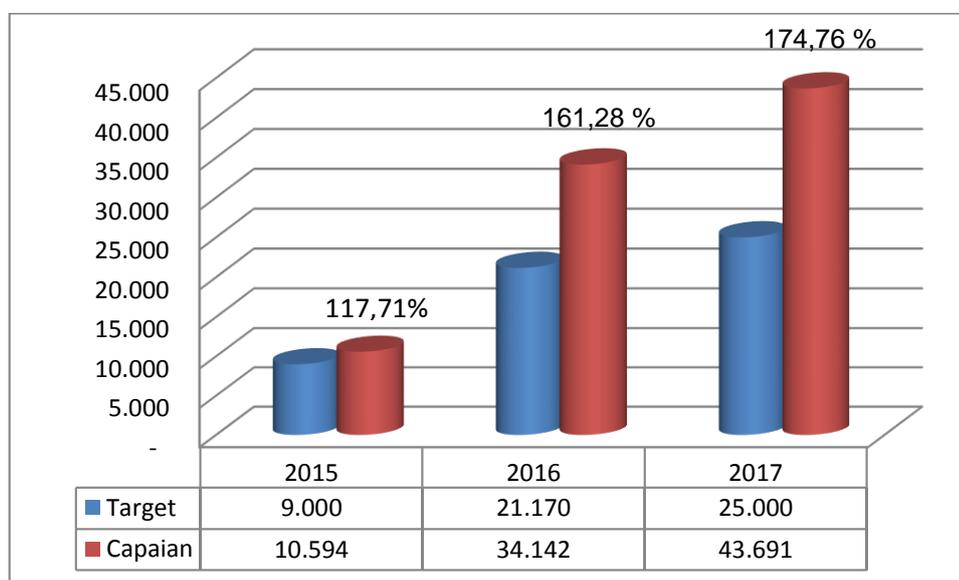
Capaian kinerja Pusat pelatihan SDM Kesehatan hingga tahun 2017 terhadap target Renstra kementerian kesehatan tahun 2015-2019 sesuai revisi sebagai berikut :

Tahun	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
2015	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	9.000	10.594	117,71 %
2016	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	21.170	34.142	161,28 %
2017	Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi SDM kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi (orang)	25.000	43.691	174,76 %

Dari tabel tersebut diatas, dapat terlihat capaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian ini didapat dari pelatihan yang diadakan di 6 UPT (BBPK dan Bapelkes) dan pelatihan yang dilaksanakan di

Provinsi dengan menggunakan dana dekonsentrasi serta pelatihan yang diselenggarakan oleh unit program, rumah sakit dan swasta.

Grafik
Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2015-2017



B. Realisasi Belanja dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah sebesar Rp. 40,549,442,000,- (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2017, Kementerian/ Lembaga diminta untuk melakukan penghematan dan pemotongan belanja tahun anggaran 2017, maka Pusat Pelatihan SDM Kesehatan telah melakukan beberapa revisi sebagai berikut :

No	Tanggal DIPA/ Revisi	Pagu Awal	Pagu Revisi	Keterangan
1	7 Desember 2016	Rp 40,549,442,000	Rp -	Pagu Awal

2	8 Maret 2017	Rp 40,549,442,000	Rp 40,549,442,000	Penghapusan Dana Blokir
3	13 April 2017	Rp 40,549,442,000	Rp 40,549,442,000	Perpindahan jumlah anggaran dari output 501 ke 951 dan Revisi RPD bulan Januari s/d Juni
4	14 Agustus 2017	Rp 40,549,442,000	Rp 29,382,345,000	Efisiensi Anggaran
5	4 Desember 2017	Rp 29,382,345,000	Rp 29,382,345,000	Pembahasan RPD Bulan Juli s/d Desember 2017

Sesuai dengan tabel diatas maka efisiensi anggaran Pusat pelatihan SDM Kesehatan adalah sebesar 27,54 % sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel
Efisiensi Anggaran Puslat SDM kesehatan Tahun 2017

No	Pagu Awal	Efisiensi	Pagu Setelah Efisiensi
1	Rp. 40,549,442,000	Rp. 11.167.097.000	Rp. 29,382,345,000

Efisiensi ini dilaksanakan dengan pertimbangan kegiatan dari masing-masing sub bidang yang pada saat dikaji tidak dapat diselenggarakan hingga akhir tahun atau telah selesai dilaksanakan dengan menyisakan anggaran (efisiensi pada kegiatan) hingga akhir tahun 2017 yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Kode	Kegiatan	Pagu Awal	Efisiensi	Pagu Akhir
2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 40,549,442,000	Rp 11,167,097,000	Rp 29,382,345,000
2076.501	Pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 24,288,478,000	Rp 7,716,465,000	Rp 16,572,013,000
2076.951	Layanan Internal	Rp 13,910,964,000	Rp 3,450,632,000	Rp 10,460,332,000
2076.994	Layanan Perkantoran	Rp 2,350,000,000	Rp -	Rp 2,350,000,000

Realisasi belanja berdasarkan output dalam upaya mendukung pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

No	Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 29,382,345,000	Rp. 27.420.023.114	93,32 %

2	2076.501	Pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 16,572,013,000	Rp. 15.130.362.680	91,30 %
3	2076.951	Layanan Internal	Rp 10,460,332,000	Rp. 10.107.766.334	96,63 %
4	2076.994	Layanan Perkantoran	Rp 2,350,000,000	Rp. 2.181.894.100	92,85 %

Rincian realisasi belanja tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

No	Sub Bidang/ Sub bagian	Pagu (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%	Sisa Pagu (Rp.)
1	Analisis Kompetensi	4,299,162,000	3,728,735,705	86.73%	570,426,295
2	Pemetaan kebutuhan Pelatihan	2,172,847,000	2,133,456,850	98.19%	39,390,150
3	Pengembangan Pelatihan Teknis	5,203,135,000	4,892,575,359	94.03%	310,559,641
4	Pengembangan Pelatihan fungsional	2,992,329,000	2,739,142,950	91.54%	253,186,050
5	Akreditasi Pelatihan	3,065,942,000	2,769,419,075	90.33%	296,522,925
6	Akreditasi Institusi	2,947,097,000	2,802,274,500	95.09%	144,822,500
7	Tata Usaha	8,701,833,000	8,354,418,675	96.01%	347,414,325
	TOTAL	29,382,345,000	27,420,023,114	93.32%	1,962,321,886

Realisasi belanja triwulan IV tahun 2017 secara keseluruhan terindikasi baik dan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut :

TAHUN	PAGU (Rp.)	REALISASI TRIWULAN IV (Rp.)	%
2017	29.382.345.000	27.420.023.114	93.32
2016	51.370.149.000	27.668.102.080	53.86
2015	65.905.820.000	38.746.494.053	58,79

Realisasi belanja per bidang dan bagian cenderung mencapai diatas 90%. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 1.707.260.633 atau sebesar 5,81 % sehingga realisasi anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 25.712.762.481,- atau 87,51% dengan rincian pengembalian per output sebagai berikut :

Kode	Kegiatan	Pagu	Pengembalian	% Pengembalian
2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 29,382,345,000	Rp 1,707,260,633	5.81%

2076.501	Pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 16,572,013,000	Rp 1,137,345,981	6.86%
2076.951	Layanan Internal	Rp 10,460,332,000	Rp 562,493,652	5.38%
2076.994	Layanan Perkantoran	Rp 2,350,000,000	Rp 7,421,000	0.32%

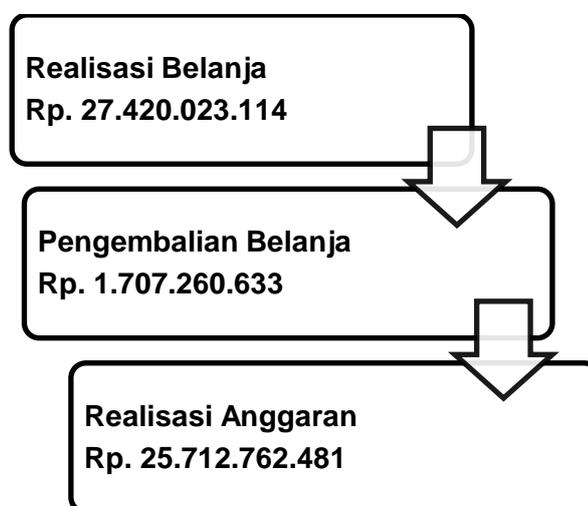
Kegiatan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 tidak dapat terealisasi mengingat sampai akhir tahun 2017 revisi Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2013 tentang Tarif dan Jenis PNBP di Lingkungan Kementerian Kesehatan belum terbit. Hal ini mengakibatkan tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai salah satu satuan kerja PNBP.

Kegiatan bersumber PNBP pada Pusat pelatihan SDM Kesehatan sebesar Rp. 554.541.000,- atau sebesar 1,89% dari anggaran tahun 2017, diuraikan oleh tabel sebagai berikut :

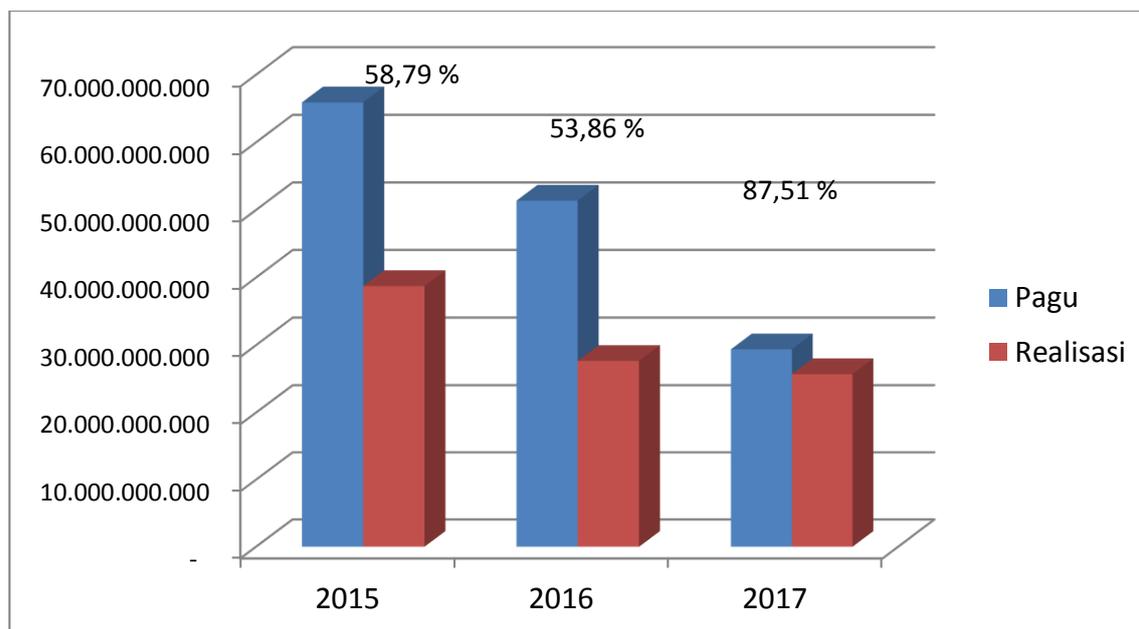
Tabel
Rincian Sumber Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
RM	Rp 28,827,804,000	Rp 27,420,023,114	95.12%
PNBP	Rp 554,541,000	Rp -	0.00%
JUMLAH	Rp 29,382,345,000	Rp 27,420,023,114	93.32%

Berdasarkan realisasi belanja dan pengembalian belanja tersebut, maka realisasi belanja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun lalu maka realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan seperti digambarkan pada grafik berikut :



Realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 87,51 % dapat diuraikan berdasarkan output sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEG/OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2076	Pelatihan SDM Kesehatan	40.549.442.000	29.382.345,000	25.712.762,481	87.51%
2076.501	Pelatihan Teknis & Fungsional Bagi SDM Kesehatan	24.288.478.000	16,572,013,000	13,993,016,699	91.30%
2076.951	Layanan Internal	13.910.964.000	10,460,332,000	9,545,272,682	96.63%
2076.994	Layanan Perkantoran	2.350.000.000	2,350,000,000	2,174,473,100	92.85%

Sedangkan realisasi anggaran menurut jenis belanja terdiri dari belanja barang sebesar Rp. 25.564.207.481 atau sebesar 87,45 % dari pagu anggaran Rp. 29.232.345.000 dan belanja modal sebesar Rp. 148.555.000 atau sebesar 99,04% dari pagu anggaran Rp. 150.000.000 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel
Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017
Berdasarkan Jenis Belanja

REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA			
JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	0	0	0
BelanjaBarang	29.232.345.000	25.564.207.481	87,45
BelanjaModal	150.000.000	148.555.000	99.04
Total	29.382.345.000	25.712.762.481	87,51

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada 5 (lima) tahun terakhir, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

Table

Realisasi Anggaran Pusat pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2013 – 2017

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Anggaran
2013	Rp. 71.945.238.000	Rp. 59.860.565.370	83.2
2014	Rp. 41.283.464.000	Rp. 35.850.947.320	85.69
2015	Rp. 65.905.820.000	Rp. 39.697.095.358	60.23
2016	Rp. 51.370.149.000	Rp. 27.668.102.080	53.86
2017	Rp. 29.382.345.000	Rp. 25.712.762.481	87.51

C. Lain-Lain

Pencapaian indikator Pusat Pelatihan SDM Kesehatan didasarkan pada Perjanjian Kinerja Puslat SDM Kesehatan tahun 2017, dimana target fisik dari indikator Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi dengan target kinerja sebesar 25.000 orang. Dari target kinerja sebanyak 25.000 orang ini diperoleh capaian sebanyak 43.691 orang atau sebesar 174,76 % yang didapat dari pelatihan teknis dan fungsional yang dilaksanakan di UPT (BBPK dan Bapelkes), 34 provinsi melalui dana dekonsentrasi, unit program kementerian kesehatan yang telah mendapat rekomendasi dari Puslat SDM kesehatan untuk melaksanakan pelatihan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan rumah sakit.

Realisasi anggaran dari pencapaian target tersebut adalah sebesar Rp. 241.583.110.381 dari anggaran Rp. 278.937.630.000 atau sebesar 86,61% dengan rincian sebagai berikut

:

Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puslat SDM Kesehatan	29,382,340,000	25,712,762,481	87.51%
BBPK/ Bapelkes	176,356,130,000	155,635,550,244	88.25%

Dana Dekonsentrasi	73,199,160,000	60,234,797,656	82.29%
TOTAL	278,937,630,000	241,583,110,381	86.61%

Sesuai tugas dan fungsinya maka Pusat Pelatihan SDM Kesehatan telah menyusun kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pelatihan seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta penyusunan kurikulum dan modul pelatihan sebagai upaya mendukung pencapaian indikator kinerja Puslat SDM Kesehatan.

Pada tahun 2017 telah disusun sebanyak 12 (dua belas) NSPK sebagai berikut :

1. Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan
2. Petunjuk Teknis Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (Teknis Substantif) Pada Pelatihan Dasar CPNS
3. Pedoman penjaminan mutu (monev) akreditasi institusi/ unit penyelenggara pelatihan bidang kesehatan
4. Juknis akreditasi institusi/ unit penyelenggara pelatihan bidang kesehatan
5. Petunjuk Teknis Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (Teknis Umum/ Administrasi) Pada Pelatihan Dasar CPNS
6. Standarisasi Kurikulum Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di fasyankes
7. Pedoman Penyusunan Soal Pelatihan
8. Pedoman Pengelolaan Sertifikat Pelatihan Bidang Kesehatan
9. Standar Kompetensi Kerja Khusus APDN
10. Standar Kompetensi Kerja Pengelola Rumah Sakit
11. Standar Kompetensi Kerja Pejabat Tinggi, Administrator, Pengawas
12. Standar Kompetensi manajerial Berdasarkan PermenPAN 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan

Selain itu juga telah disusun kurikulum dan modul sebanyak 9 kurikulum dan 6 modul termasuk revisinya sebagai berikut :

1. Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Radiografer
2. Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien
3. Kurikulum Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
4. Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Teknik Elektromedis (revisi)
5. Kurikulum Tugsus Individu
6. Kurikulum Surveyor/ Asesor Akreditasi Institusi Pelatihan
7. Kurikulum Tim Pengendali Mutu Institusi Pelatihan
8. Kurikulum PPIH
9. Kurikulum Manajemen Puskesmas

10. Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Teknik Elektromedis (revisi)
11. Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Radiografer
12. Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Perekam Medis
13. Modul Tugsus Individu
14. Modul PPIH
15. Modul Manajemen Puskesmas

Selain menyusun kebijakan teknis berupa penyusunan NSPK, Kurikulum dan modul, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga mengakreditasi institusi dan pelatihan yang menjadi syarat pelaksanaan pelatihan. Pada tahun 2017 telah diakreditasi sebanyak 18 institusi yaitu :

1. Bapelkes Dinkes Provinsi Jawa Barat
2. Bapelkes Provinsi Sumatera Utara
3. Bapelkes Semarang
4. UPTD Bapelkes Provinsi Sulawesi Utara
5. UPTD Bapelkes Provinsi Kalimantan Selatan
6. UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah
7. UPTD Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur
8. UPTD Bapelkes Provinsi Lampung
9. BBPK Ciloto
10. Bapelkes Cikarang.
11. Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Dinkes Provinsi Maluku
12. Balai Latihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua
13. UPTD BKOM dan Pelkes Prov Sumatera Barat
14. BBPK Makassar
15. RS Kanker Dharmais
16. RSUP DR. Kariadi
17. RSUP DR. Sardjito
18. Yayasan Gadar Medik Indonesia

Dan telah mengakreditasi sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) pelatihan dan diterbitkan juga 644 rekomendasi pelaksanaan pelatihan. Pelatihan yang telah diakreditasi dan mendapatkan rekomendasi ini dilaksanakan oleh unit program, swasta, rumah sakit dan bapelkes daerah di Indonesia.

Assesmen yang telah dilaksanakan yaitu untuk peserta Diklat PIM II, III dan IV serta untuk latsar CPNS. Selain itu juga telah dilaksanakan Fit and proper Test Untuk Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan, Assesment juga membuat Standat Kompetensi Kerja Khusus APDN, Instrument Leadership, Instrument Assesmen Diklat PIM 2, Diseminasi Standar Kompetensi Manajerial, dan Standar Kompetensi Pelatih pada Pelatihan di Bidang Kesehatan. Untuk pemetaan pelatihan telah menghasilkan petunjuk teknis penguatan kompetensi teknis bidang tugas (teknik substantif) dan ada pelatihan dasar CPNS dan petunjuk teknis penguatan kompetensi teknis bidang tugas (teknik umum/administrasi) pada pelatihan dasar CPNS serta Pedoman KPM.

Sebagai upaya memastikan bahwa penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan mutu dan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan komponen akreditasi pelatihan, maka Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga melaksanakan monev pelatihan untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh unit program, swasta, rumah sakit ataupun provinsi dengan dana dekonsentrasi.

Evaluasi pasca pelatihan PIS-PK sebagai program prioritas juga dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelatihan yang telah diselenggarakan. Evaluasi pasca pelatihan ini dilaksanakan dengan instrument bagi atasan langsung, rekan kerja, alumni pelatihan sebelumnya dan masyarakat. EPP PIS-PK dilaksanakan di 15 kabupaten di 5 provinsi yaitu :

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Puskesmas
1	Sulawesi Tenggara	5	10
2	Riau	3	6
3	Jawa Timur	3	6
4	Nusa Tenggara Timur	2	4
5	Papua	2	4
	Jumlah	15	30

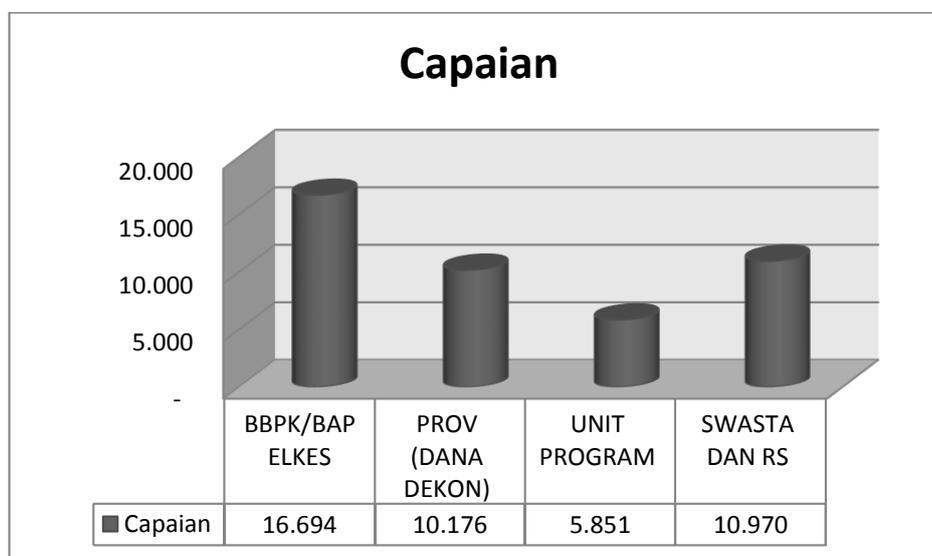
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPK, Bapelkes, Bapelkes Daerah melalui Dana dekonsentrasi, Unit Program serta pelatihan yang bukan dari APBN yang diselenggarakan oleh rumah sakit dan swasta namun telah diakreditasi oleh Puslat SDM Kesehatan.

Rincian capaian indikator tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Penyelenggara Pelatihan	(Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi SDM Kesehatan)
1	BBPK/BAPELKES	16,694
2	DINKES PROVINSI (DANA DEKON)	10,176
3	UNIT PROGRAM KEMENKES	5,851
4	SWASTA DAN RS	10,970
TOTAL		43,691

Grafik

Komposisi Capaian Kinerja Pusat pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017



Dari target fisik sejumlah 25.000 orang ternyata capaian melebihi sejumlah 43.691 orang atau sekitar 174,76 %. Namun secara anggaran serapan hanya 87,76%. Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Revisi PP terkait PNBPN

Sampai dengan akhir tahun 2017, revisi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2013 tentang tariff dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan kementerian kesehatan belum terbit sehingga tidak ada penerimaan Negara pada Puslat SDM Kesehatan serta tidak adanya realisasi kegiatan bersumber PNBPN sebesar Rp. 554.541.000,-

2. Revisi DIPA dan RPD

Revisi pada DIPa/ RPD yang terjadi 4 (empat) kali mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan serta jadwal pelaksanaan kegiatan

3. Kebijakan Efisiensi

Kebijakan efisiensi yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan terkait pengurangan anggaran dan pelaksanaan penjadwalan kegiatan

4. Kebijakan perubahan jenis pelatihan

Kebijakan perubahan jenis pelatihan mengakibatkan perubahan pada volume output pelatihan serta jenis pelatihan yang dilaksanakan di BBPK/ Bapelkes

Sumber daya manusia (SDM) pada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan per Desember 2017, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

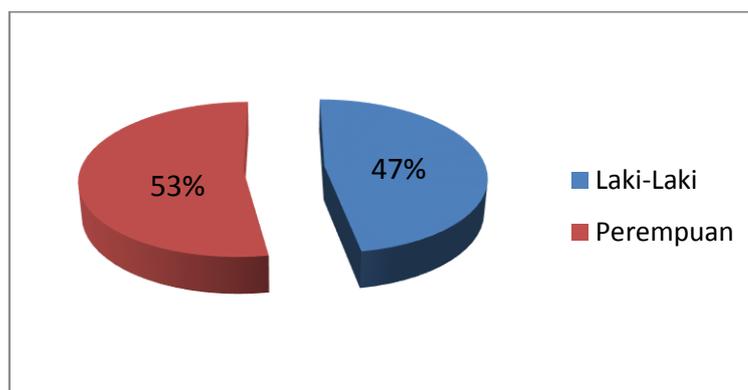
Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat pelatihan SDM Kesehatan sejumlah 93 orang yang diuraikan sebagai berikut :

a. Menurut jenis Kelamin

- Laki-Laki : 44 orang
- Perempuan : 49 orang

Grafik

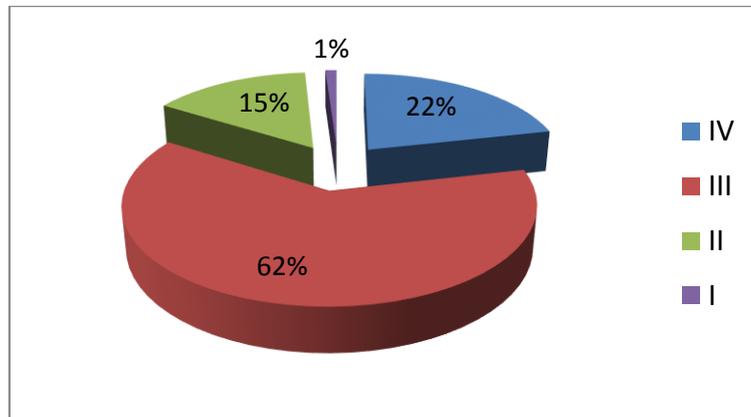
Jumlah SDM Pusat SDM Kesehatan Menurut Jenis Kelamin



b. Menurut Golongan Ruang/ Kepangkatan

- Golongan IV : 20 orang
- Golongan III : 58 orang
- Golongan II : 14 orang
- Golongan I : 1 orang

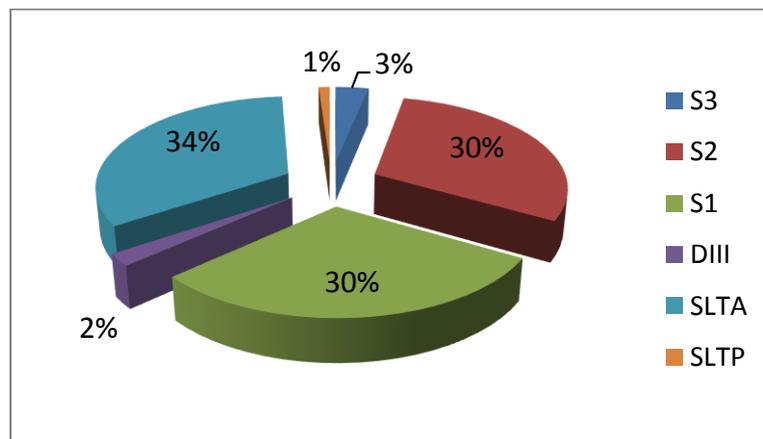
Grafik
Jumlah SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Golongan Ruang/
Kepangkatan



c. Menurut Pendidikan

- S3 : 3 orang
- S2 : 28 orang
- S1 : 29 orang
- DIII : 2 orang
- SLTA : 31 orang
- SLTP : 1 oarng

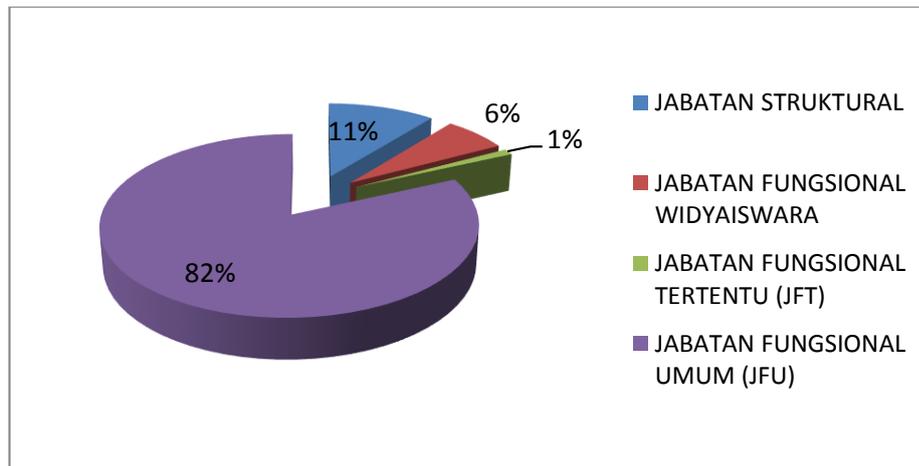
Grafik
Jumlah SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Pendidikan



d. Menurut jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH	%
1	JABATAN STRUKTURAL		
	a. Eselon II	1	1.08%
	b. Eselon III	3	3.23%
	c. Eselon IV	6	6.45%
	Sub Total	10	10.75%
2	JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA		
	a. Widyaiswara Utama	3	3.23%
	b. Widyaiswara	3	3.23%
	Sub Total	6	6.45%
3	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)		
	a. Kesehatan		
	b. Non Kesehatan		
	1) Arsiparis Penyelia	1	1.08%
	Sub Total	1	1.08%
4	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)		
	a. Perencana	2	2.15%
	b. Pengevaluasi	1	1.08%
	c. Analis Data	32	34.41%
	d. Bendahara	2	2.15%
	e. Penata Laporan Keuangan	1	1.08%
	f. Verifikator Keuangan	3	3.23%
	g. Pengelola BMN	2	2.15%
	h. Pranata Komputer	1	1.08%
	i. Pengolah Data	3	3.23%
	j. Analis Kepegawaian	3	3.23%
	k. Analis Kepegawaian Pemula	1	1.08%
	l. Agendaris	1	1.08%
	m. Sekretaris	1	1.08%
	n. Pengadministrasi Umum	19	20.43%
	o. Arsiparis Pemula	4	4.30%
	Sub Total	76	81.72%
	TOTAL KESELURUHAN	93	

Grafik
Jumlah SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Jabatan

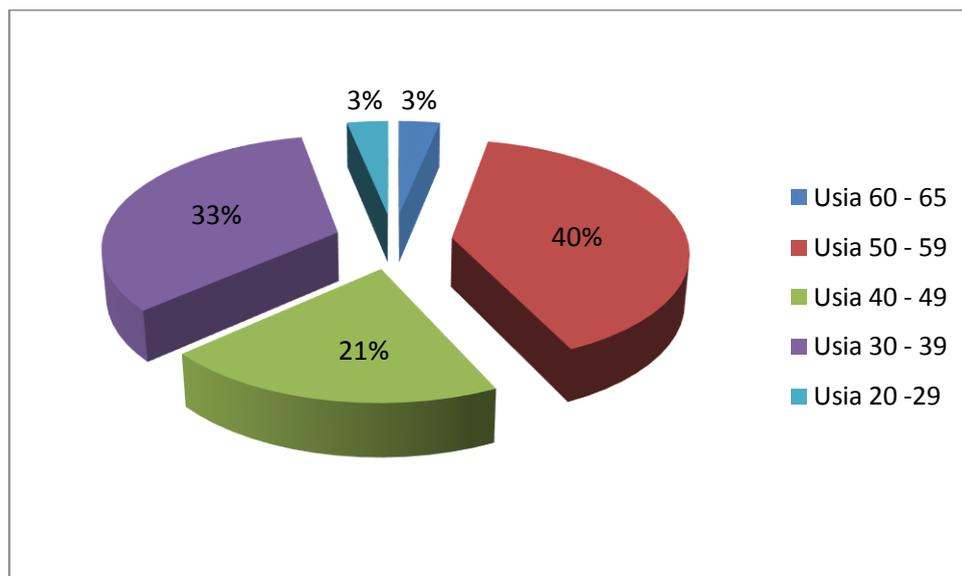


e. Menurut Usia

- Usia 60 – 65
- Usia 50 – 59
- Usia 40 – 49
- Usia 30 – 39
- Usia 20 – 29

Grafik

Jumlah SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Usia



Dari gambaran sumber daya manusia yang ada di Pusat pelatihan SDM Kesehatan disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada merupakan SDM yang produktif dalam mendukung pencapaian kinerja dan anggaran Puslat SDM Kesehatan.

2. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan revisi DIPA terakhir tahun 2017 maka alokasi belanja Program Pelatihan SDM Kesehatan tergambar pada table dibawah ini :

Table

Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat pelatihan SDM Kesehatan

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Anggaran
2017	Rp. 29.382.345.000	Rp. 25.712.762.481	87.51

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan berada di Gedung badan Pengembanagn dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan lantai 7 danberalamat di Jl. Hang jebat III Blok F.3 kebayiran baru Jakarta Selatan. Pengelolaan gedung merupakan wewenang Sekretariat badan PPSDM Kesehatan.

Sarana dan Prasarana yang ada baik peralatan bergerak maupun tidak bergerak yaitu peralatan dan mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berada dalam kondisi masih baik berjumlah 480 unit dengan nilai Rp. 3.481.882.882,- sedangkan aset tetap yang tidak digunakan berjumlah 74 unit senilai rp. 10.502.800,-. Aset tak berwujud berupa software senilai Rp. 509.245.000,-

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai pencapaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Secara umum pencapaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan baik. Dari segi fisik mencapai 174,76% dan dari segi anggaran mencapai 87,51%. Pencapaian anggaran tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dan kebijakan pelaksanaan pelatihan.

Berbagai upaya dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja diantaranya sebagai upaya menjaga mutu dan kualitas pelatihan serta mendukung capaian indikator kinerja, maka Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelatihan baik pelatihan yang dilaksanakan dengan dana dekonsentrasi maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh unit program, rumah sakit maupun swasta. Hal ini juga sebagai upaya agar pelatihan yang dilaksanakan sesuai standard yang tercantum dalam pedoman akreditasi pelatihan yang sebelumnya telah diajukan sehingga nantinya pelatihan tersebut berhak mendapatkan sertifikat yang diakui.

Pusat pelatihan SDM Kesehatan juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelatihan dengan UPT dan Dinas Kesehatan provinsi dalam pelaksanaan pelatihan. selain itu Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan unit-unit program untuk mengakomodir pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Usulan unit program dalam menyelenggarakan pelatihan ditindaklanjuti dengan terbitnya surat rekomendasi pelatihan.

Sebagai upaya pelaksanaan pelatihan yang lebih baik dan efisien, diharapkan adanya koordinasi dan komitmen antara seluruh pelaksana kegiatan sehingga rencana penarikan dana (RPD) dan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sehingga capaian dan kinerja dapat lebih optimal.

Selain itu peran monitoring dan evaluasi perlu lebih dimaksimalkan sehingga hasil monev dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan pelatihan yang lebih baik serta capaian program pelatihan dapat lebih dipantau sehingga segala permasalahan lebih cepat ditangani.